



LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

2024

**KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorame Tahun 2024.

Laporan ini disusun sebagai suatu konsekwensi Rencana Strategis Kecamatan Sukorame dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorame dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2024.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah (PD) terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di masa mendatang.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan tugas satu tahun dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP Tahun 2024 ini.


CAMAT SUKORAME
RAKHMAT HIDAYAT, S.H.,M.M
Pembina
NIP. 19730328 199502 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii-iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv-v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Gambaran Umum Organisasi	3
1. Data Personil Kecamatan Sukorame.....	3
2. Kondisi Sarana Dan Prasarana yang digunakan	5
3. Pembiayaan	6
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	9
1. Tujuan	9
2. Sasaran dan Indikator Sasaran	11
3. Program dan Kegiatan	12
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	26
BAB IV PENUTUP	35
A. KESIMPULAN	35
B. SARAN	35
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Berpijak pada Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 adalah :

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yaitu **"Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, demokratis dan bebas korupsi serta pelayanan publik yang berkualitas"**. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 ditetapkan tujuan : **"Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan"** yang diaplikasikan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukorame menjadi 2 (dua) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan guna merelisasikan tujuan dari misi tersebut yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di kecamatan;
2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Dari Visi Kabupaten Lamongan tersebut diatas perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu kebijakan dan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program-program tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil sehingga

sempurna oleh karena itu perlu adanya dukungan dan bimbingan dari instans terkait guna penyempurnaannya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kecamatan Sukorame, adalah merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa, bernegara adapun guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Kantor Kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas guna mengukur keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan perlu dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya.

A.1. Dasar Hukum

1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotesme;
2. UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Inpres No : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
4. Keputusan Kepala LAN – RI No : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala LAN – RI No : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja da Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) ;

7. Impres No : 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
8. SE Menpan No : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja ;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan ;

A.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Kecamatan Sukorame Tahun 2024, dimaksud sebagai laporan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah Kantor Kecamatan Sukorame dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2024.

2. Tujuan :

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Kecamatan Sukorame Tahun 2024, adalah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa, bernegara, adapun guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Kantor kerja serta dapat di pertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 tahun 2016**. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sedangkan susunan Struktur Organisasi PD Kecamatan Sukorame sebagaimana pada lampiran.

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan administrasi dan urusan umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana, dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelayanan teknis administratif Kecamatan dan semua satuan unit kerja di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Gambaran Umum Organisasi

Sumber Daya Kecamatan Sukorame

Bahwa dalam menjalankan tugas, sebagian wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 tahun 2016, Camat dibantu beberapa personil, Sarana dan Prasarana serta pembiayaan sebagai berikut :

1. Data Personil Kecamatan Sukorame

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	RAKHMAT HIDAYAT, SH., MM	CAMAT	Pembina (IV/a)	S - 2	
2	MAT SAEKAN, SH. M.M	SEKCAM	Pembina (IV/a)	S - 2	
3	WIWID BAYU SANTOSO,S.Kom	KASI TRANTIBUM	Penata (III/c)	S - 1	
4	NURUL HUDHA,SH	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tingkat I (III/d)	S - 1	
5	HANDYAN CIPTA ADITYA,SE,MM	KASI PPM	Penata Tk.I (III/d)	S - 2	
6	AYUB,SH,MM	KASI PELAYANAN PUBLIK	Pembina (IV/a)	S - 2	
7	DEWI KARTIKA EKA SARI,SE,MM	KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI & KEU	Penata Tk.I (III/d)	S - 2	
8	GIONO,S.Sos	KASUBAG KEPEGAWAIAN	Penata Tingkat I (III/d)	S - 2	
9	PASIYAT	STAF	Penata Muda (III/a)	SMA	
10	SUTIAWAN	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
11	DIDIK PURWANTO	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
12	SRIYANTO	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	

13	SADIRIN	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
14	TRISNO BUDI UTOMO	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
15	NURUL ADELIA YATININGTYAS, Amd.Ak	STAF	Pengatur (II/c)	D - 3	
16	ROJAB SUPRAYITNO	STAF	HONORER DAERAH	SMA	
17	DODIK PRASETYO	STAF	KONTRAK KANTOR	SMA	
18	RUTI'AH,SE	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
19	ZAENAL FATONI PUTRA	STAF	KONTRAK KANTOR	SMA	
20	LILIK PUJIATI,S.Pd	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
21	AULIA RACHMA AGUSTIN,SM	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
22	IDHA RAHAYUNINGSIH,S.Pd	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
23	ROSIA NANTA	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
24	BINTI ISRO'IN	STAF	KONTRAK KANTOR	SMP	
JUMLAH			24		

2. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

No	Nama	Jumlah (Unit)
1	Tanah bangunan dan kantor pemerintah	6
2	Mobil Kijang Isuzu	1
3	Sepeda Motor	7
4	Almari Besi(Arsip)	13
5	Filing Kabinet	2
6	Alat Pemadam /Portable (Alat Pemadam / Portable)	1
7	LCD Proyektor dan layar	1
8	Meja Kerja	24
9	Camera + Attachment (Camera + Attachment)	1
10	Meja Rapat	7
11	Kursi Rapat	100
12	Kursi Tunggu	7
13	Kursi Tamu	3
14	Kursi Kerja	24
15	Komputer	9
16	Leptop	8
17	Printer	9
18	AC	10
19	Televisi	2
20	Kulkas	2
21	Lemari besi	1
22	Sound System	1

3. Pembiayaan

Dalam Tahun 2024 Anggaran Keuangan guna menunjang kegiatan keberhasilan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Kantor kerja Kantor Kecamatan Sukorame selama 1 tahun yang telah terealisasi sebesar Rp2,703.107.800,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp2,665.371.800,- dan
2. Belanja Modal sebesar Rp. 37.736.000,-

D. Sistematika Penyajian LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukorame di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .

Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis, Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 Dari Visi tersebut diatas perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

b. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi.

2. SARAN

Pada sub bab ini diuraikan langkah – langkah di masa datang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Metriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2021-2026
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Lampiran lainnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sukorame Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sukorame tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Sukorame tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Sukorame tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Sukorame Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031;
4. Renstra Kecamatan Sukorame Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.

1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, dengan ditetapkannya visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. yaitu:

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan telah dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut

Misi ke-1

Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah;

Misi ke-2

Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman;

Misi ke-3

Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan;

Misi ke-4

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram.

Misi ke-5

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, demokratis dan bebas korupsi serta pelayanan publik yang berkualitas

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (Lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yaitu **Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, demokratis dan bebas korupsi serta pelayanan publik yang berkualitas**

. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 ditetapkan 2 tujuan antara lain

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

maka untuk mewujudkan Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan Kecamatan Sukorame menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan guna merelisasikan tujuan dari misi tersebut yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di kecamatan;
2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.

Untuk merealisasikan misi, tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Sukorame Tahun 2021-2026 adalah;

Sebagaimana Tabel. 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD
KECAMATAN SUKORAME TERHADAP RPJMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 – 2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN / TUJUAN	KONDISI AWAL KINERJA 2021	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif		Nilai IKM	79,75%	82,75%	82,80 %	82,85%	82,90%	82,95 %	82,95 %
		Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	79,95%	82,75%	82,80 %	82,85 %	82,90 %	82,95 %	82,95 %
2	Meningkatnya Kemandirian Desa		Jumlah Desa Mandiri	-	1 Desa	1 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa
		Meningkatnya pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	-	1 Desa	1 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa

3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Sukorame antara lain :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Program dan Kegiatan

Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Sukorame yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Sukorame, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 OPD Kecamatan Sukorame memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukorame serta kerangka pendanaan daerah, Rencana kerja Kecamatan Sukorame secara substansial sesuai dengan Visi dan Misi ke 4 Kepala Daerah Kabupaten Lamongan (RKPD, RPJMD dan Renstra Kecamatan Sukorame) dengan Renja K / L dan Rencana kerja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang Pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang Pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan Sukorame Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukorame, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2024, dan Renstra Kecamatan Sukorame, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Sebagai langkah untuk mewujudkan target kinerja tahunan Kecamatan Sukorame telah menetapkan agenda pembangunan berupa program dan kegiatan pembangunan Kecamatan selama satu tahun ke depan, program dan kegiatan pembangunan dimaksud merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan saat ini dan yang akan datang, adapun Program dan Kegiatan tahun 2024 Kecamatan Sukorame menetapkan 5 Program dan 11 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Pegawai

2. Administrasi Keuangan Pegawai

Untuk meningkatkan kesejahteraan kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah serta mendorong terwujudnya sistem administrasi yang baik dengan kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi serta mendorong terwujudnya sistem administrasi yang baik dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

5. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahann Daerah*

Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi serta mendorong terwujudnya sistem administrasi yang baik dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
3. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

2. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :*

1. Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2. Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

1. Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum

Berikut adalah Uraian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja setiap level Jabatan :

- Perjanjian Kinerja Camat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	86
		Nilai SAKIP Kecamatan	A
2	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	3Desa
		Prosentase penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tepat	100%

		Waktu	
		Prosentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%
		Prosentase Konflik yang tertangani	100%
		Prosentase urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan	100%

- Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		Prosentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
		Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
		Prosentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
		Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

- Perjanjian Kinerja Seksi Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 desa

- Perjanjian Kinerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9 Desa
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat kecamatan dan Kelurahan	9 Desa
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Desa

- Perjanjian Kinerja Seksi Pelayanan Publik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3 Jenis Pelayanan 86 IKM

- Perjanjian Kinerja Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	9 Desa
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Desa

- Perjanjian Kinerja Kasubag Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah	Prosentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %
		Prosentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %
		Prosentase penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %
		Prosentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	100 %
		Prosentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %
		Prosentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %
		Prosentase Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100 %
		Prosentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %
		Prosentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %
		Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	100 %
		Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %
		Prosentase pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %

- Perjanjian Kinerja Kasubag Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
1	Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Jumlah membantu pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kinerja, Program dan Kegiatan Kecamatan	5 Dok
2	Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan ;	Jumlah Membantu menyusun laporan Pertanggung jawaban atas pelaksanaa pengelolaan keuangan ;	4 Laporan
3	Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Membantu menyusun bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen
4	Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan	Prosentase penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan ;	100 %
5	Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pernbayaran lainnya	Jumlah Membantu penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pernbayaran lainnya	14 Kali
6	Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan	Jumlah Membantu administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan	12 kali
7	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Jumlah membantu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	12 kali
8	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya	240 kali

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Dengan masuk pada **Misi ke-5** yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, demokratis dan bebas korupsi serta pelayanan publik yang berkualitas, dengan **Sasaran** yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik kecamatan, dan **Indikator Sasaran** yaitu **Indek Kepuasan Masyarakat** dengan Target Indikator Kinerja sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET INDIKATOR KINERJA					KONDISI AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026	
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,75	82,75	82,80	82,85	82,90	82,95	82,95
RENSTRA KECAMATAN SUKORAME	Nilai IKM Layanan Kecamatan	79,95	82,75	82,80	82,85	82,90	82,95	82,95

Dari hasil pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kecamatan Sukorame Tahun 2024 menunjukkan kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,32** atau konversi IKM **82.95** dengan mengumpulkan sebanyak 200 responden.

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dalam pencapaian kinerja organisasi, Kantor Kecamatan Sukorame telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis maka perlu dilakukan analisa capaian kinerja Sebagai berikut :

A.1. Pencapaian Kinerja tahun 2024

NO	SASARAN		SATUAN	TARGET 2024			KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu		2.558.809.300,00	2.368.013.145,00	92,54	
	Kegiatan : Pencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.800.000,00	14.247.100,00	84,80	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	2 Dokumen	6.800.000,00	4.747.100,00	69,81	

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	4 Dokumen	10.000.000,00	6.610.500,00	66,10
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.065.205.900,00	1.905.449.093,00	92,26
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPJ gaji	14 Dokumen	2.048.405.900,00	1.890.914.693,00	92,31
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	10.000.000,00	7.773.400,00	77,73
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	6.800.000,00	6.761.000,00	99,42
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			88.540.500,00	85.166.400,00	96,19
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	26 jenis	9.996.000,00	9.996.000,00	100
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	30 Jenis	35.088.000,00	33.877.100,00	96,54
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	4 jenis	20.000.000,00	19.322.000,00	96,61
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	2.328.000,00	1.694.000,00	72,76
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan rapat yang disediakan, Jumlah minuman yang disediakan, Jumlah Minuman rapat yang disediakan	350 Box	21.128.500,00	20.277.300,00	95,97
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.736.000,00	36.175.000,00	95,86
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	4 Jenis	37.736.000,00	36.175.000,00	95,86
Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah			279.334.000,00	263.130.052,00	94,19
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 rekening	26.500.000,00	19.196.556,00	72,43
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	6.090.000,00	6.090.000,00	100,00
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayan kantor dan administrasi/teknis	10 orang	246.744.000,00	237.843.496,00	96,39
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah			71.192.900,00	63.845.500,00	89,67
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Pajak Surat yang terbayar	1 Unit Mobil 6 Unit Motor	2.700.000,00	1.189.300,00	44,04

	<i>program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	<i>Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah</i>		10.000.000,00	6.049.500,00	60,49	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah</i>			10.000.000,00	6.049.500,00	60,49	
2	Sub Kegiatan : Penanganan Konflik Sosial Sesuai Paeraturan perundang-Undangan	Jumlah Masyarakat Miskin yang terfasilitasi	9 desa	10.000.000,00	6.049.500,00	60,49	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	9 desa	55.798.500,00	50.632.400,00	90,74	
	Kegiatan : <i>Fasilitasi, rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			55.798.500,00	50.632.400,00	90,74	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>jumlah desa yang difasilitasi</i>	9 desa	22.798.500,00	20.318.900,00	89,12	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>jumlah desa yang difasilitasi</i>	9 desa	13.000.000,00	11.493.000,00	88,40	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat 9 Desa Daerah dan Instansi Vertikal terkait	9 desa	10.000.000,00	8.932.500,00	89,32	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	<i>jumlah desa yang difasilitasi</i>	9 desa	10.000.000,00	9.888.000,00	98,88	
	JUMLAH			2.703.107.800,00	2.498.884.845,00	92,44	

A.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023, dan tahun 2024

No	Program	Indikator Capaian Program	Realisasi			Perkembangan %
			Akhir Tahun 2022	Akhir Tahun 2023	Akhir Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%

2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	B	B	B	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	9 Desa	9 Desa	9 Desa	0%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100%

2.1 Laporan Evaluasi Realisasi dan Capaian kinerja Tahun 2024

Tabel Laporan Evaluasi hasil Realisasi dan Capaian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Program / Kegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Ca dan Anggaran yang di	
			I		II		III		IV		7=3+4	
1	2		3		4		5		6		7=3+4	
	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	Rp.2,558.809.300	14,10%	353.311.564	31,25%	782.924.264	23,51%	589.073.821	25,12%	642.703.496	92,49%	2.
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp. 16.800.000	5,23%	1.045.000	2,22%	443.400	40,40%	8.079.700	27,85%	4.679.000	84,80%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp.2.065.205.900	14,38%	290.102.288	33,86%	683.016.304	23,38%	471.517.277	22,31%	460.813.224	92,26%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp. 88.540.500	0,19%	194.000	5,50%	5.529.000	33,91%	34.092.000	44,97%	39.815.000	96,19%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp. 37.736.000	0%	0	0%	0	0%	0	95,86%	36.175.000	95,86%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp. 279.334.000	21,30%	58.970.276	32,13%	88.935.560	22,35%	61.883.344	19,10%	53.340.872	94,20%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp. 71.192.900	4,21%	3.000.000	7,02%	5.000.000	18,96%	13.501.500	59,48%	42.344.000	89,69%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Rp. 22.000.000	13,08%	2.878.000	0%	0	3,10%	682.000	81,55%	17.940.000	97,73%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp. 22.000,000	13,08%	2.878.000	0%	0	3,10%	682.000	81,55%	17.940.000	97,73%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Rp. 56.500,000	6,40%	1.343.000	1,90%	675.500	36,69%	20.727.800	50,40%	28.478.500	93,26%	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp. 35.500,000	0%	0	1,90%	675.500	53,73%	19.072.500	33,21%	11.790,500	92,62%	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	Rp. 21.000.000	6,40%	1.343.000	0%	0	7,88%	1.655.300	79,47%	16.688.000	94,33%	

Tingkat Kecamatan dan Kelurahan												
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Rp. 10,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	60.50 %	6.049.500	60,50%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp. 10,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	60,50%	6.049.500	60,50%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0%	Rp. 55.798.500	12,98%	7.240.000	6,79%	3.787.100	15,03%	8.388.000	55.95 %	31.217.300	90,74%	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp. 55.798.500	12,98%	7.240.000	6,79%	3.787.100	15,03%	8.388.000	55.95%	31.217.300	90,74%	

3. Urusan yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2024

Urusan Kecamatan yang ada di Kecamatan Sukorame pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan melalui 5 (Lima) Program dan 11 (Sebelas) Kegiatan sebagai berikut :

1. URUSAN KECAMATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4. ANALISIS KINERJA

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan program, kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorame selama 1 (satu) tahun, maka perlu dilakukan Analisis kinerja agar dapat diketahui tingkat keberhasilan/kegagalan dan peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai evaluasi kinerja antara lain sebagai berikut :

5.1. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Mempunyai 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan berhasilnya semua kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka kecamatan memiliki pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.
- **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Mempunyai 2 (Dua) Kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan. Karena Komitmen seluruh pegawai Kecamatan Turi atas Pelayanan Publik yang baik, sehingga Nilai Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan.
- **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Mempunyai 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan berhasilnya program tersebut maka Kantor Kecamatan Turi dapat terus melakukan peningkatan Pelayanan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan berhasilnya program tersebut maka Kantor Kecamatan Turi dapat melakukan peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum dengan baik
- **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan berhasilnya program tersebut maka Kantor Kecamatan Turi dapat melakukan peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik.
- **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil karena pemerintah dan aparaturnya terus memberikan berbagai fasilitas dan peningkatan pembangunan baik di tingkat Desa maupun Kecamatan demi tercapainya masyarakat yg lebih makmur dan sejahtera.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran tahun 2024 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan 7 (Tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 2.558.809.800,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.368.013.145.00,- atau 92,54% digunakan untuk :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Belanja Operasi	: Rp. 16.800.000,-
- Belanja Modal	: Rp. -
- Total	: Rp. 16.800.000,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Belanja Operasi	: Rp. 2.065.205.900,-
- Belanja Modal	: Rp. -
- Total	: Rp. 2.065.205.900,-

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Belanja Operasi	: Rp. 88.540.500,-
- Belanja Modal	: Rp. -
- Total	: Rp. 88.540.500,-

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Belanja Operasi	: Rp. -
- Belanja Modal	: Rp. 37.736.000,-
- Total	: Rp. 37.736.000,-

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Belanja Operasi	: Rp. 279.334.000,-
- Belanja Modal	: Rp. -
- Total	: Rp. 279.334.000,-

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Belanja Operasi	: Rp. 71.192.900,-
- Belanja Modal	: Rp. -
- Total	: Rp. 71.192.900,-

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan 1 (Satu) kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 22.000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.500.000,- atau 97,72% digunakan untuk :

1. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Belanja Operasi	: Rp 22.000.000,-
- Belanja Modal	: Rp. -
- Total	: Rp. 22.000.000,-

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 56.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.689.800,- atau 93,25% digunakan untuk :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Belanja Operasi	: Rp. 35.500.000,-
- Belanja Modal	: Rp. -
- Total	: Rp. 35.500.000,-

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Belanja Operasi	: Rp. 21.000.000,-
- Belanja Modal	: Rp. -
- Total	: Rp. 21.000.000,-

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan 1 (Satu) kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 10,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.049.500,- atau 60,49% untuk :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan digunakan sebagai berikut :

- Belanja Operasi	: Rp. 10.000.000,-
- Belanja Modal	: Rp. -
- Total	: Rp. 10.000.000,-

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 55.798.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.632.400,- atau 90,74% digunakan untuk :

1. Kegiatan Fasilitas, rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Belanja Operasi	: Rp. 55.798.500,-
- Belanja Modal	: Rp. -
- Total	: Rp. 55.798.500,-

A. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	APBD PAK 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1	2	3	5	7
	KECAMATAN	2.703.107.800,00	2.498.884.845,00	92,44
7.01.60.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.558.809.300,00	2.368.013.145,00	92,54
7.01.60.01.2.01	Prencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.800.000,00	14.247.100,00	84,80
7.01.60.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.800.000,00	4.747.100,00	69,81
7.01.60.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	6.610.500,00	66,10
7.01.60.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.065.205.900,00	1.905.449.093,00	92,26
7.01.60.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.048.405.000,00	1.890.914.693,00	92,31
7.01.60.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	7.773.400,00	77,73
7.01.60.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.800.000,00	6.761.000,00	99,42
7.01.60.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.540.500,00	85.166.400,00	96,44
7.01.60.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.000,00	9.996.000,00	100
7.01.60.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.088.000,00	33.877.100,00	96,54
7.01.60.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.322.000,00	98,35
7.01.60.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.328.000,00	1.694.000,00	72,76
7.01.60.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.128.500,00	20.277.300,00	90,85
7.01.60.01.2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.736.000,00	36.175.000,00	95,86
7.01.60.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.736.000,00	36.175.000,00	95,86
7.01.60.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	279.334.000,00	263.130.052,00	94,19
7.01.60.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.500.000,00	19.196.556,00	53,17
7.01.60.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.090.000,00	6.090.000,00	100,00
7.01.60.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.744.000,00	237.843.496,00	96,39
7.01.60.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	71.192.900,00	63.845.500,00	89,67
7.01.60.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.700.000,00	1.189.300,00	44,04

7.01.60.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.492.900,00	37.656.200,00	86,58
7.01.60.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100
7.01.60.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.000.000,00	21.500.000,00	97,72
7.01.60.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	22.000.000,00	21.500.000,00	97,72
7.01.60.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000,00	21.500.000,00	97,72
7.01.60.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.500.000,00	52.689.800,00	93,25
7.01.60.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.500.000,00	32.881.500,00	92,62
7.01.60.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.500.000,00	20.426.000,00	99,63
7.01.60.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	12.455.500,00	83,03
7.01.60.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	21.000.000,00	21.000.000,00	100
7.01.60.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21.000.000,00	21.000.000,00	100
7.01.60.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	6.049.500,00	60,49
7.01.60.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	6.049.500,00	60,49
7.01.60.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Paeraturan perundang-Undangan	10.000.000,00	6.049.500,00	60,49
7.01.60.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.798.500,00	50.632.400,00	90,74
7.01.60.06.2.01	Fasilitasi, rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.798.500,00	50.632.400,00	90,74
7.01.60.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.798.500,00	20.318.900,00	89,12
7.01.60.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.000.000,00	11.493.000,00	88,40
7.01.60.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	8.932.500,00	89,32
7.01.60.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	9.888.000,00	98,88
	J U M L A H	2.703.107.800,00	2.498.884.845,00	92,44

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukorame dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Sukorame berdasarkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999.

Dengan adanya refocusing Anggaran Kegiatan Kecamatan Sukorame dalam mencapai kinerja tahun 2024, menetapkan 5 program dan 12 kegiatan, yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorame sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaannya 5 (lima) Program 12 (Dua Belas) Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian / tujuan dan sasaran kegiatan.

Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2024 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.

B. SARAN

Perlu kiranya bahwa penyusunan LKjIP Kecamatan Sukorame ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya perbaikan - perbaikan, baik format penyajian maupun dalam pengkajian permasalahan - permasalahan yang ada, maka masih perlu adanya pembinaan guna penyempurnaan.



Sukorame, Januari 2025
CAMAT SUKORAME

RAKHMAT HIDAYAT, S.H.,M.M

Pembina

NIP 19730328 199502 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK RENSTRA KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2021-2026

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN 1:

Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif				
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Nilai IKM Kabupaten	Nilai interval SKM Kabupaten	Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kabupaten Lamongan		

Sasaran 1 : Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah									
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja					
				2022	2023	2024	2025	2026	82,95
Nilai SAKIP Kecamatan	Perhitungan Inspektorat	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	79,95	82,75	82,80	82,85	82,90	82,95	81,50

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN 2:

Tujuan 2 : Meningkatkan Kemandirian Desa				
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Indikator ini menghitung capaian peningkatan jumlah Desa Mandiri setiap tahunnya	0 Desa	1 Desa

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Desa									
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	Indikator ini menghitung jumlah Desa Maju setiap tahunnya	1 Desa	2 Desa	3 Desa	3Desa	4 Desa	5 Desa	5 Desa

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM Kabupaten	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
							3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
							4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
							5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
							6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
							7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
							2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	3 Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
							Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM Kabupaten	Nilai	82,75		
		Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	89		
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	Persentase	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Jumlah Desa Mandiri	Nilai	1 Desa	1 Desa	100%
		Jumlah Desa Maju	Jumlah	3 Desa	3 Desa	63%
		Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	Persentase	100%	100%	100%
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	Persentase	100%	100%	100%
		Persentase Desa Naik Kelas	Persentase	100%	100%	100%

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
					(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Kecamatan	82,95%	82,95%	100%	2.558.809.300,00	2.368.013.145,00	92,54 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	16.800.000,00	14.247.100,00	84,80 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	6.800.000,00	4.747.100,00	69,81 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%	10.000.000,00	6.610.500,00	66,10 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	2.065.205.900,00	1.905.449.093,00	92,26
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	100%	2.048.405.900,00	1.890.914.693,00	92,31
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%	10.000.000,00	7.773.400,00	77,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	12 Laporan	100%	6.800.000,00	6.761.000,00	99,42

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
					(Rp)	(Rp)	%
	Triwulanan/ Semesteran SKPD						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Administrasi Pemerintahan yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	88.540.500,00	85.166.400,00	96,19
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	9.996.000,00	9.996.000,00	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	35.088.000,00	33.877.100,00	96,54
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	20.000.000,00	19.322.000,00	96,61
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	2.328.000,00	1.694.000,00	72,76
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	21.128.500,00	20.277.300,00	95,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	37.736.000,00	36.175.000,00	95,86
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100%	37.736.000,00	36.175.000,00	95,86

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
					(Rp)	(Rp)	%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	100%	279.334.000,00	263.130.052,00	94,19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	26.500.000,00	19.196.556,00	72,43
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	6.090.000,00	6.090.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	14 Laporan	14 Laporan	100%	246.744 000,00	237.843.496,00	96,39
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	71.192.900,00	63.845.500,00	89,67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	100%	2.700.000,00	1.189.300,00	44,04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	100%	43.492.900,00	37.656.200,00	86,58

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
					(Rp)	(Rp)	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Gedung	100%	25.000.000,00	25.000.000,00	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100%	100%	100%	22.000.000,00	21.500.000,00	97,72
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100%	100%	100%	22.000.000,00	21.500.000,00	97,72
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	100%	22.000.000,00	21.500.000,00	97,72
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100%	100%	100%	22.000.000,00	21.500.000,00	97,72
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%	22.000.000,00	21.500.000,00	97,72
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	100%	100%	56.500.000,00	52.689.800,00	93,25

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
					(Rp)	(Rp)	%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Dibidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	100%	100%	35.500.000,00	32.881.500,00	92,62
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	100%	20.500.000,00	20.426.000,00	99,63
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%	15.000.000,00	12.455.500,00	83,03
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	100%	21.000.000,00	21.000.000,00	100
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	82 Keluarga	82 Keluarga	100%	21.000.000,00	21.000.000,00	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	55,18%	55,18%	100%	55.798.500,00	50.632.400,00	90,74
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	100%	100%	55.798.500,00	50.632.400,00	90,74

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
					(Rp)	(Rp)	%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	22.798.500,00	20.318.900,00	89,12
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	13.000.000,00	11.493.000,00	88,40
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	10.000.000,00	9.888.000,00	98,88